

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktifitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi capital terlebih dahulu dan akumulasi capital ini berasal dari dana tabungan. Di samping itu Smith juga menitikberatkan pada "luas pasar". Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, sehingga pasar terdiri dari pasar dalam dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi capital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktifitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan

pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan akumulasi capital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

Menurut David Ricardo, di alam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan capital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan.

Menurut David Ricardo bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengelola tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

Dalam gambar dibawah ini tampak adanya distribusi pendapatan. Dalam hal pendapatan nasional, tampak bahwa bagian upah dan sewa meningkat terus, sedangkan laba menurun dengan semakin berkembangnya waktu. Dalam pendapatan perkapita, upah selalu tetap pada tingkat batas, laba menurun dan sewa meningkat. Hal ini dikarenakan oleh semakin langkanya sumberdaya tanah, sehingga sewa menjadi semakin mahal dan laba berkurang.

Sesuai penggolongan di atas dikatakan pula bahwa pendapatan nasional dibagi menjadi tiga bagian yaitu upah, sewa, dan keuntungan, masing-masing untuk pendapatan tenaga kerja (buruh), tuan tanah dan kapitalis. Jadi pendapatan nasional dibagikan untuk golongan buruh, kapitalis dan tuan tanah dalam proses perkembangan ekonomi. Bila pendapatan nasional sebagian besar berupa keuntungan, maka perkembangan ekonomi akan lebih pesal jalannya.

Selanjutnya David Ricardo membedakan antara penerimaan bruto (gross revenue) dan penerimaan neto (net revenue). Penerimaan bruto ialah nilai pasar dari barang-barang akhir yang dibuat dalam suatu waktu tertentu, sedangkan penerimaan neto merupakan pendapatan (economic surplus) yang memungkinkan adanya pertumbuhan selanjutnya. Adanya penerimaan bersih ini karena buruh dapat menghasilkan sesuatu yang melebihi suatu tingkat nilai yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi penerimaan neto ialah yang menyebabkan adanya perkembangan ekonomi apabila digunakan untuk akumulasi capital. Bila penerimaan neto ini berkurang karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang berarti pembagian pendapatan menjadi lain bentuknya, sehingga keuntungan yang diterima oleh capital berkurang dan perkembangan

selanjutnya berhenti. Jadi penerimaan neto (economic surplus) ini bila diinvestasikan kembali akan mengakibatkan terjadinya perkembangan. Penerimaan neto yang merupakan keuntungan ini akan semakin berkurang karena tanah-tanah terbatas adanya. Pemanfaatan tanah akan bergeser dari tanah-tanah subur ke tanah-tanah yang semakin kurang subur.

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula merendahkan biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapirtalis dan mendorong mereka untuk memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaaan efektif (effective demand) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Jadi kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi bilamana ia tidak membawa kenaikan permintaan efektif. Lagi pula perkembangan penduduk, walaupun juga menambah permintaan efektif, belum tentu membawa perkembangan ekonomi.

Menurut Malthus, untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah capital untuk investasi yang terus menerus. Akan tetapi dari mana capital itu akan didapat? Pertanyaan itu di jawab oleh Malthus bahwa apa yang diterima orang sebagai penghasilan tidak selalu dibelanjakan semua untuk

memenuhi kebutuhannya, melainkan ada sebagian yang ditabung. Dengan demikian ada kecenderungan bahwa jumlah barang-barang yang dihasilkan tidak semuanya dapat terjual.

Hal ini berlainan dengan pendapat J.B Say yang terkenal dengan hukum pasarnya: dimana dikatakan bahwa "supply creates its own demand". Artinya ialah asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakikatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Pendapat ini dikritik oleh Malthus dengan mengatakan bahwa hukum Say itu hanya berlaku bila kenaikan pendapatan seluruhnya digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa ($C = Y$). Malthus melanjutkan pendapatnya bahwa tabungan sangat perlu demi pembentukan kapitalis. Kapitalis harus diinvestasikan dan investasi tersebut baru diadakan setelah ada permintaan untuk investasi. Permintaan akan investasi akan ada bila terdapat kenaikan jumlah permintaan (aggregate demand). Jadi menurut Malthus adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi dapat diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan menekanya tingkat upah dan disamping itu juga karena pendapatan yang diterima ada di tabung dan tidak di konsumsi semuanya. Oleh karena itu Malthus merasa pesimis terhadap perkembangan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa tabungan di samping merupakan pendorong bagi perkembangan ekonomi, yaitu sebagian sumber kapitalis, juga dapat merupakan penghambatan karena memperkecil jumlah permintaan efektif.

2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, muncul ketika isu mengenai lingkungan muncul pada dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia baru atau lama tidak menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menompang ekonomi dunia tidak di perhatikan. Sinyal pertama mengenai batas pertumbuhan adalah laporan dari Club of Rome pada tahun 1972. Dengan menggunakan ekstrapolasi ekonometrika dari data statistic, penulis buku *The Limits to Growth* menyimpulkan bahwa “bila trend pertumbuhan saat ini dalam penduduk dunia, industrialisasi, polusi, produksi makanan, dan deplesi sumberdaya terus tidak berubah, batas pertumbuhan atas planet ini akan dicapai dalam waktu kurang dari 100 tahun mendatang”.

Namun ternyata ramalan Club of Rome tidak terbukti. Pemikiran mereka pun mendapat banyak kritikan baik secara metodologi maupun asumsinya bahwa sumberdaya terbatas jumlahnya. Kendati demikian, akhir-akhir ini isu mengenai lingkungan hidup semakin gencar dengan adanya laporan mengenai menipisnya lapisan ozon di atas planet bumi kita, isu polusi (udara, tanah dan air), erosi tanah, dan penggundulan hutan.

Lester Brown (1981) menunjukkan 4 area utama dari sudut pandang sustainabilitas, yaitu :

1. Tertinggalnya transisi energy
2. Memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian).

3. Ancaman perubahan iklim (polusi, dampak “rumah kaca”, dsb), serta
4. Kurangnya bahan pangan.

Pada gilirannya, ini memperkuat pandangan bahwa strategi pembangunan di banyak Negara seakan “buta” terhadap lingkungan hidup. Para pendukung utama pembangunan berkelanjutan lalu menunjukkan pentingnya strategi *ecodevelopment*, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, namun yang paling utama strategi pembangunan ini harus berkelanjutan, baik dari sisi ekologi maupun juga dari sisi social.

3. Teori penduduk Malthusian

Malthus dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Population*” (dalam Deliarnov, 2005) menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil - hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama hasil pangan jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaanya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya.

Karena perkembangannya yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap

kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan yang semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akan mengakibatkan terjadinya bahaya pangan bagi manusia. Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari malapetaka karena adanya kekurangan bahan makanan adalah dengan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan berbagai kebijakan misalnya saja dengan program keluarga berencana. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga bahaya kerawanan pangan dapat teratasi.

Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan menunda usia kawin sehingga dapat mengurangi jumlah anak (Deliarnov, 2005). Maltus dalam Mubyarto (1972), pada tahun 1888 menerbitkan buku yang terkenal mengenai persoalan - persoalan penduduk dan masalah pemenuhan kebutuhan manusia akan bahan makanan. Penduduk bertambah lebih cepat daripada pertambahan produksi bahan makanan. Penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan hanya bertambah menurut deret hitung. Karena perkembangannya yang lebih cepat dari pada pertumbuhan produksi bahan makanan, maka Maltus meramalkan akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia.

Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan sebagai faktor produksi bahan makanan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. Menurut Sri-Edi Swasono (dikutip dari Mubyarto,

1972), ditinjau dari sudut ekonomi pertanian maka adanya persoalan penduduk dapat dilihat dari tanda- tanda berikut :

1. Persediaan tanah pertanian yang semakin kecil.
2. Produksi bahan makanan per jiwa yang terus menurun.
3. Bertambahnya pengangguran.
4. Memburuknya hubungan - hubungan pemilik tanah dan bertambahnya hutan - hutan pertanian.

4. Pengertian Lahan dan Penggunaan Lahan

Lahan merupakan tanah (sekumpulan tubuh alamiah, mempunyai kedalaman, lebar yang ciri - cirinya mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang) ditambah ciri - ciri fisik lain seperti: penyediaan air dan tumbuhan penutup yang dijumpai, Soepardi (dalam Supriadi, 2004). Sedangkan Menurut FAO (1995), lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik, termasuk iklim, topografi, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan.

Menurut Utomo (1992), lahan memiliki ciri - ciri yang unik dibandingkan dengan sumberdaya lainnya, yakni lahan merupakan sumberdaya yang tidak akan habis, namun jumlahnya tetap dan dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan. Lahan digunakan untuk berbagai kegiatan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Utomo (1992), lahan memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi kegiatan budaya, yakni lahan merupakan suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman,

baik sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan, hutan produksi, dan lain lain.

2. Fungsi lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang bisa menunjang dalam usaha pelestarian budaya.

Menurut Saefulhakim (dalam Ruswandi, 2005), penggunaan lahan merupakan gambaran perilaku manusia terhadap lahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penggunaan lahan tersebut. Sesuai dengan pendapat Bratakusumah (dikutip oleh Ruswandi, 2005) bahwa rencana tataguna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat mengenai pola tataguna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang, sehingga tujuan dari perencanaan tataguna lahan adalah melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tataguna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu. Utomo, *et al* (1992) mengatakan bahwa secara garis besar penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi alaminya, seperti kesuburan lahan, kandungan mineral atau endapan bahan galian dibawah permukaannya.
2. Penggunaan lahan dalam kaitannya dengan pemanfaatan untuk ruang pembangunan, di mana dalam penggunaannya tidak memanfaatkan

potensi alaminya, namun lebih ditentukan oleh adanya hubungan - hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, diantaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya.

5. Faktor- factor Yang Mempengaruhi Perubahan Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan perubahan fungsi peruntukan tanah untuk yang semula untuk kepentingan pertanian kemudian berubah fungsi peruntukannya untuk keperluan non pertanian, seperti pembangunan pabrik, perumahan, tempat pembelanjaan dan tempat wisata.

Menurut Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal ini di sebabkan oleh :

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari wilayah lahan kering.
4. Pembangunan prasarana dan saran pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan area persawahan.

Menurut Lestari (2009) proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu :

1. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

2. Faktor Internal

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.

3. Faktor Kebijakan

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Menurut Wicaksono (2007) faktor lain penyebab alih fungsi lahan pertanian terutama ditentukan oleh :

1. Rendahnya nilai sewa tanah (land rent) ; lahan sawah yang berada disekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah untuk pemukiman dan industry.
2. Lemahnya fungsi control dan pemberlakuan peraturan oleh lambaga terkait.

3. Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumber daya alam di era otonomi.

Menurut Irwan (2005), ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan.

1. Sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industry dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan sekitar meningkat.
2. Peningkatan harga lahan selanjutnya dapat memangsa petani lain di sekitarnya untuk menjual lahannya.

Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yaitu :

1. Dengan masuknya berbagai industri di sekitar mereka tinggal, harga penjualan tanah miliknya menjadi lebih mahal, bahkan dipandang lebih menguntungkan dari pada untuk usaha pertanian, sehingga keinginan untuk menjadi OKB (orang kaya baru) dapat segera tercapai.
2. Sulitnya mencari tenaga kerja pertanian di lingkungan mereka tinggal, sebab terjadi kecenderungan angkatan kerja, khususnya generasi muda untuk tidak lagi bersedia atau tertarik menjadi petani yang dianggap pekerja kotor, berat dan tidak bergengsi.

3. Usaha-usaha pertanian yang selama ini dilakukan, pendapatannya dirasakan semakin merosot, sebab semakin meningkatnya biaya produksi dan harga jual yang relatif rendah atau murah.
4. Semakin bertambahnya pembangunan industri di lingkungan mereka tinggal yang dilengkapindengan saran sumur-sumur artesis yang dibuat, menyebabkan sulitnya pengairan untuk usaha pertanian. Banyak saluran irigasi yang menjadi tidak berfungsi seperti semua, sehingga banyak tanah disekitar industry dipaksa di ubah menjadi tanah kering, bahkan ditelantarkan untuk investasi atau di bangun untuk rumah-rumah persewaan dan lain-lainnya.

6. Pembangunan Pertanian

Sebagaiman diungkapkan dalam bagian pengantar, sektor pertanian merupakan sektor yang amat sangat dominan bagi penduduk yang negaranya sedang berkembang. Bagian ini mencoba melihat peranan dari sektor pertanian dalam pembangunan nasional terutama dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan pada sektor non pertanian.

Sumbangan Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi. Secara garis besar Simon Kusnetz mengemukakan sumbangan sektor pertanian dalam membangun industri, meliuti sumbangannya dalam menyediakan produk pertanian, dalam penyediaan faktor dan menyerap faktor produksi seperti tenaga, sumbangan pasar yaitu meningkatkan permintaan dalam negeri dan sumbangannya atas pencitaan dan penghematan devisa. Berikut diberikan gambaran sumbangan sektor pertanian dalam ekonomi nasional.

- a. Sektor pertanian pada umumnya merupakan sektor yang menjadi gantungan hidup sebagian besar keluarga, baik dilihat dari proporsi sumbangan sektor ini terhadap produk nasional maupun dilihat dari sumbangannya terhadap penciptaan kesempatan kerja. Oleh karena itu maka kemajuan atau keterbelakangan ekonomi secara nasional.
- b. Perumbuhan sektor non pertanian sangat tergantung di negara sedang berkembang tergantung pada peningkatan penyediaan pangan yang mantap. Disamping itu berbagai industri juga merupakan industri yang menggantungkan pada pasokan bahan baku yang berasal dari pertanian (misalnya tekstil, rokok,) dan berbagai agroindustry.
- c. Trasfer tenaga kerja berlangsung dari sektor pertanian ke industri mengingat produktifitasnya yang rendah. Trasfer ini berarti terjadinya pengalihan faktor produksi dari bidang yang produksifitasnya rendah ke yang produksifitasnya lebih tinggi.
- d. Pertanian dapat memberi sumbangan yang bermanfaat pada neraca pembayaran dengan meningkatkan penerimaan negara dari ekspor barang pertanian atau dengan menghasilkan produk pertanian sebagai pengganti impor. Ekspor barang pertanian bisa menghasilkan devisa untuk kemudian digunakan mengimpor barang-barang yang modal, sedangkan substitusi impor bisa menghemat penggunaan devisa untuk kemudian digunakan mengimpor barang modal.
- e. Karena peranan sektor pertanian dominan, maka pertumbuhan dan pemekaran sektor ini amat erat kaitannya dengan pertumbuhan pasar

dalam negeri. Ekonomi pertanian yang tumbuh diikuti dengan distribusi pendapatan yang lebih adil akan memperbesar permintaan total sehingga mendorong produksi industri dan proses industri dan proses industrialisasi.

7. Konversi atau Alih Fungsi Tanah

Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut undang-undang pokok agrarian. Perlu dijelaskan bahwa "hak lama" di sini adalah hak-hak atas tanah sebelum diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan hak baru memuat Undang-Undang Pokok Agraria adalah Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya pasal 16 ayat 1, c, q Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai.

Konversi atau pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sedikit banyaknya karena faktor ekonomi dan faktor industrialisasi yang menyebabkan berpindahnya fungsi lahan atau tanah. Jumlah penduduk yang senantiasa bertambah akan menimbulkan pola penggunaan tanah di suatu daerah berubah, disamping itu mata pencaharian serta tingkat kehidupan dan penyebarannya sangat ditentukan pada penggunaan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), seseorang yang mempunyai hak atas lahan (tanah) diharuskan untuk menggunakannya. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kekuatan kepada pemegang hak atas tanah, serta membatasi dan melarang perlakuan yang tidak sewajarnya terhadap lahan (tanah).

Antara pengelolaan hak atas lahan (tanah) yang dibawah Badan Pertanahan Nasional atau yang disebut dengan (BPN) dengan kewajiban penggunaan lahan (PBB) kurang sejalan, dan akan sulit diharapkan kedua instrument tersebut akan dapat melakukan pengendalian terhadap penggunaan lahan. Pembasahan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian terutama lahan sawah telah berlangsung lama. Sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan pertanian memerlukan kebijakan yang dapat menyelesaikan secara fundamental terkait adanya sejumlah kebijakan yang objek pengaturannya adalah lahan (tanah).

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya relative tetap dan tidak mungkin bertambah, maka pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan lahan atau tanah sangat diperlukan. Pengaturan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan bertujuan agar perubahan penggunaan lahan atau tanah dapat terkendali khususnya dalam perubahan penggunaan fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian adalah merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan pengembangan pembangunan yang terus ditingkatkan berdampak pada perubahan penggunaan lahan.

Perubahan spesifikasi dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali

dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian social.

Pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian social ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Adanya konversi lahan di satu sisi dan diperlukannya pembangunannya jaringan irigasi baru disisi lain, menunjukkan suatu kontradiksi yang perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Walaupun konversi lahan dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun dari segi investasi, hal tersebut berarti pemubaziran, karena membuang asset yang sudah dimiliki. Sementara itu, untuk pembangunan jaringan irigasi baru sudah barang tentu diperlukan waktu dan dukungan dana yang tidak sedikit. Untuk membangun sawah beririgasi teknis dibutuhkan dana yang sangat besar, sedangkan hasil produksi dari sawah baru biasanya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas sawah yang sudah jadi.

Dalam pemanfaatan lahan pertanian selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan, yang mana laju alih fungsi lahan pertanian tersebut dari tahun ke tahun diperkirakan mencapai ratusan ribu hektar pertahun. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung yang sangat besar.

Konversi lahan pertanian pada umumnya berdampak sangat besar pada bidang social dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat salah satunya dari

berubahnya fungsi lahan tersebut. Menurut Somaji (1994), konversi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sector pertanian petani pelaku konversi dan menaikkan pendapatan dari sector non-pertanian.

Siholaho (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi atau berdampak pada perubahan struktur agrarian. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu :

1. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan lahan atau tanah dapat diketahui dari kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya prose marginalisasi.
2. Perubahan pola penggunaan lahan. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agrarian, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sector pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi dari berlangsungnya perubahan ini adalah

dimanfaatkannya lahan tanpa mengenal sistem “bera” khususnya untuk tanah sawah.

3. Perubahan pola hubungan agrarian. Tanah yang makin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil tanah “maro” menjadi “mertelu”. Demikian juga dengan munculnya dengan sistem tanah baru yaitu sistem baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.
4. Perubahan pola nafkah agrarian. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
5. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, et al (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industry di pulau jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat.
2. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasaranan dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
3. Berkurangnya ekosistem sawah.

Selain dampak tersebut dengan adanya konversi atau pengalihan fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian juga bisa menyebabkan timbulnya berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Ini dikarenakan kurangnya daerah resapan air karena banyak berdirinya bangunan-bangunan yang tadinya merupakan lahan pertanian.

Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali sehingga berdampak negatif pada produksi pangan, fisik lingkungan dan budaya masyarakat yang hidup di atas maupun di sekitar lahan yang mengalami alih fungsinya. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif serta perlindungan terhadap petani merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Untuk membangun sistem pertahanan pangan nasional yang lebih baik, berbagai tantangan muncul seiring dengan proses pembangunan yang dilakukan

antara lain upaya untuk tetap mempertahankan stabilitas keseimbangan ketersediaan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional di satu sisi dengan bertambahnya jumlah penduduk, permasalahan degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan pertanian ke non budidaya disisi lain.

8. Penggunaan Lahan Pertanian dan Keterkaitan dengan Perubahan Lahan Pertanian

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kepentingan umum / masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya.

Konflik pengguna dan pemanfaat lahan bersifat dilematik mengingat peluang perluasan areal pertanian sudah sangat terbatas, sementara tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa dan properti semakin meningkat. Dengan demikian perubahan penggunaan lahan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak mungkin dapat dihindari.

Bila keadaan dilematis ini tidak segera diatasi dengan pengembangan kebijakan pertahanan maka kelangsungan sistem pertanian sulit dipertahankan, mengingat selama tiga dekade terakhir belum ada sesuatu terobosan teknologi dan kelembagaan yang mampu mengkompentasi penurunan produksi pertanian akibat

berkurangnya tanah-tanah pertanian (khususnya sawah beririgasi teknis) yang dirubah kepenggunaan lain.

Perubahan penggunaan lahan merupakan bertambahnya penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan diikuti pengurangan jenis lahan di sektor lainnya. Atau dengan kata lain perubahan penggunaan lahan merupakan perubahannya fungsi lahan pada periode waktu tertentu , misalnya saja dari lahan pertanian digunakan untuk lahan non pertanian.

Menurut Wahyunto (2001), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Penggunaan lahan salah satu wujud nyata dari aktivitas manusia pada suatu lahan. Penggunaan lahan sangat dinamis karena mengalami perubahan dari suatu penggunaan lahan menjadi penggunaan lahan lainnya.

Penggunaan lahan non pertanian merupakan penggunaan lahan selain untuk kegiatan pertanian. Penggunaan lahan tersebut dapat berupa penggunaan lahan untuk permukiman, perdagangan, industri pertambangan dan sosial.

1. Permukiman

Pemukiman merupakan suatu lahan yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk tempat tinggal dengan membangun rumah-rumah dan sarana lainnya.

2. Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan jual-beli barang atau jasa. Penggunaan lahan untuk usaha perdagangan ini diwujudkan dengan didirikannya fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pasar tradisional, supermarket, toko dan bursa efek.

3. Industri

Industri merupakan suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tentunya kegiatan ini membutuhkan lahan sebagai tempat pengolahan. Kadang-kadang bangunan tempat kegiatan industri sering berdekatan sehingga disebut kawasan industri.

4. Pertambangan

Pertambangan merupakan usaha manusia dalam menemukan, menggali, dan mengolah barang-barang tambang. Biasanya lahan yang digunakan untuk pertambangan terdapat di pedesaan atau di pedalaman. Kadang-kadang kegiatan pertambangan memerlukan lahan yang cukup luas.

5. Sosial/Jasa

Penggunaan lahan untuk aktivitas sosial atau jasa antara lain dapat berupa penggunaan lahan untuk perkantoran, rumah sakit, taman, lapangan sepak bola, sekolahan, kuburan dan jalan. Pembangunan fasilitas ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Adanya perubahan-perubahan tata guna lahan atau alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (industri) mengindikasikan terjadinya peralihan hak atas tanah dari petani kepada pengusaha industri. Disamping itu juga terindikasi

bahwa di satu pihak telah menciptakan 'tuan-tuan tanah' baru, dilain pihak juga menciptakan 'kelangkaan atau penyempitan tanah atau lahan' petani.

Menurut Yusiadi (2003), terdapat berbagai faktor yang menjadikan sebab semakin banyaknya perubahan tata guna lahan. Misalnya karena minat pembeli atau pengusaha dalam rangka pembangunan industrinya dan factor pemilik tanah atau warga masyarakat untuk menjual tanahnya. Bermula karena naiknya harga tanah yang tinggi semakin mendorong minat pemilik tanah untuk menjual tanahnya pada para pengusaha. Naiknya harga tanah dikalangan warga masyarakat disekitar industri telah menyatukan kepentingan ekonomi antara pengusaha si industri dan pemiliktanah. Penyatuan ekonomi ini berlanjut menjadi sebagai komoditas ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai objek spekulasi.

9. Dampak Alih Penggunaan Lahan

Terkonsentrasinya pembangunan ekonomi di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti konstruksi, industri dan perdagangan akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan.

Menurut Firman (2005) dalam Widjianarko (2006) bahwa alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa infasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota.

Menurut Situmeang (1998), perubahan struktur ekonomi dimana telah terjadi peningkatan peranan sektor non-pertanian terhadap perekonomian dapat mempercepat

perubahan pola penggunaan lahan ke arah pengkotaan. Selanjutnya, perubahan struktur perekonomian sendiri dapat dijelaskan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat terjadinya struktur ekonomi kearah sektor manufaktur, jasa dan sektor non-pertanian lainnya.

Furi (2007) menjelaskan bahwa Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dinaryanti pada tahun 2014 yang berjudul “ *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo* ” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang terjadi di daerah sepanjang saluran irigasi Bendung Colo dengan studi kasus di Kecamatan Ngugter, Desa Pengkol dan Desa Gupit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan alat analisis regresi berganda dalam menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, serta wawancara mendalam untuk mengetahui faktor – faktor lain yang mempengaruhi konversi lahan yang terjadi di Desa Pengkol dan Desa Gupit. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat empat hal yang

mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Yaitu : 1) faktor Ekonomi, 2) faktor Sosial, 3) faktor Kondisi Lahan dan 4) peraturan pemerintah. Hasil dari lapangan membuktikan bahwa proses konversi lahan yang terjadi di masing – masing desa yaitu memiliki masalah yang berbeda, di Desa Pengkol faktor yang mendorong petani mengkonversi lahan pertanian adalah faktor peraturan pemerintah dan kondisi lahan,yaitu pengenaan pajak tanah sawah menjadi tanah industri. Sedangkan yang terjadi di Desa Gupit faktor yang mendorong petani untuk mengkonversi lahan adalah faktor sosial dan kondisi lahan. Dampak sosial dari terjadinya konversi lahan dapat dilihat dari kondisi hubungan/ interaksi antar warga, dan kondisi gaya hidup masyarakat sekitar. Tidak maksimalnya output yang di hasilkan tanaman padi yaitu dikarenakan kondisi lahan di Desa Gupit terdapat banyak hama yang menyerang tanaman padi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Johannes Jonick J. Ndawa pada tahun 2014 yang berjudul “*Dampak Alih Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-Oro Ombo-Batu)*” yang bertujuan untuk mengetahui dampak kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga petani di Kota Batu setelah adanya alih penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian. Penelitian ini menggunakan metode survey yang tujuannya mengetahui hubungan antara perubahan luas lahan sebelum dan sesudah alih penggunaan lahan terhadap kesempatan kerja petani dan pendapatan rumah tangga petani. Teknik analisa data yang digunakan adalah kuantitatif deskripsi dan Uji Statistik Non-parametrik

yakni Uji Chi-Square dan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga petani sebelum alih penggunaan lahan dan setelah alih penggunaan lahan atau dengan kata lain perubahan kesempatan kerja dan pendapatan memiliki korelasi terhadap luas lahan kepemilikan petani.

Pada tahun 2011 penelitian yang dilakukan oleh Zaenil Mustopa yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak” Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Demak. Hal ini menjadi penting karena sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran yang penting bagi perekonomian dan memberikan sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah jumlah penduduk, jumlah industri, serta jumlah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Dengan menggunakan data primer yaitu dengan cara wawancara secara langsung serta data sekunder yang di peroleh dari badan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuadrat terkecil biasa dan model estimasinya yaitu dengan mentransformasikan ke dalam bentuk semi logaritma, yang kemudian dianalisis dengan regresi. Analisis perkembangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian beberapa tahun ke belakang yang terjadi di Kabupaten. Demak dianalisis dengan metode grafik. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik itu jumlah penduduk, jumlah industri, maupun jumlah PDRB berpengaruh positif terhadap besarnya alih fungsi

lahan. Akan tetapi hanya variabel jumlah penduduk dan jumlah industri yang terbukti signifikan. Variabel jumlah PDRB terbukti tidak signifikan. Dari analisis dengan metode grafik dapat diketahui bahwa jumlah alih fungsi lahan di Kabupaten Demak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan tersebut digunakan untuk pemukiman penduduk serta pembangunan pabrik untuk sektor industri.

Penelitian yang berjudul “ Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Klaten ” yang dilakukan oleh Rhina Uchyani F, Susi Wuri Aniini bertujuan untuk mengetahui tingkat konversi lahan pertanian ke non – pertanian sektor di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode pengamatan 1998-2007. Data yang digunakan adalah penggunaan ekstensif dari lahan basah dan lahan kering di 26 kabupaten. Tingkat perkembangan konversi lahan pertanian ke sektor non-pertanian dihitung dengan menggunakan metode analisis pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata lahan sawah adalah -0.53 % . Ada tiga kabupaten dengan tingkat pertumbuhan yang positif : Kabupaten Kemalang , Ngawen dan Wonosari . Peningkatan lahan kering terjadi di hampir setiap kabupaten, kecuali Kabupaten Kemalang . Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan lahan kering adalah positif . Setiap perubahan 1 % pada tingkat pertumbuhan lahan kering yang luas akan menyebabkan perubahan lahan kering sebesar 0,47 % .

C. Hipotesis

Hipotesis dapat diajukan sebagai jawaban sementara dari sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Oleh karena itu menurut landasan teori yang

telah dilakukan sebelumnya, maka jawaban yang menjadi hipotesis dari peneliti ini adalah

1. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi jumlah Luas Lahan yang terdapat pada Kabupaten Sleman.
2. Jumlah Rumah berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi jumlah Luas Lahan yang terdapat pada Kabupaten Sleman.
3. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi jumlah Luas Lahan yang terdapat pada Kabupaten Sleman.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap Luas Lahan dapat digambarkan dalam model dengan berikut :

